



**PENGALIHAN PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DARI
KEMENTERIAN KEUANGAN KE MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

AISHA SAFA KAMILA

NIM 11000120130640

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGALIHAN PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DARI
KEMENTERIAN KEUANGAN KE MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

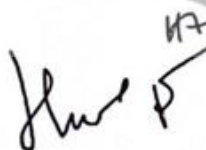
Oleh :

AISHA SAFA KAMILA

NIM 11000120130640

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H.
NIP 197010281998022001

Pembimbing II



Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum.
NIP 196212081987031001

HALAMAN PENGUJIAN

**PENGALIHAN PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK DARI
KEMENTERIAN KEUANGAN KE MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

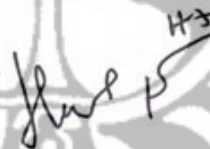
AISHA SAFA KAMILA

NIM 11000120130640

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

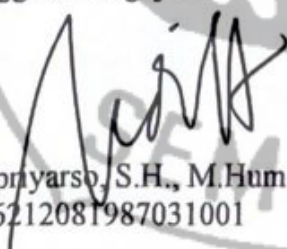
Dewan Penguji

Ketua



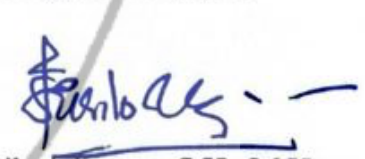
Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H.
NIP 197010281998022001

Anggota Penguji I



Dr. Budi Ispryarsa, S.H., M.Hum.
NIP 196212081987031001

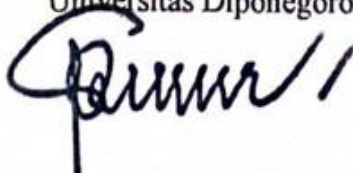
Anggota Penguji II



F.C. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum.
NIP 196609111992031003

Mengesahkan:

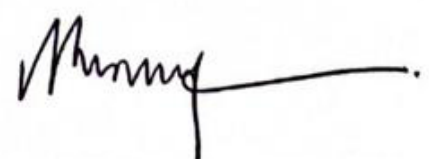
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Februari 2024



Aisha Safa Kamila
11000120130640

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“For indeed, with hardship [will be] ease. Indeed, with hardship will be ease”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

*“These mistakes will cause you to lose things. Losing things doesn't just mean losing. A lot of the time when we lose, we gain things too-
Hard things will happen to us, we will recover, we will learn from it, we will grow more resilient because of it”*

-Taylor Swift

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada anggota keluarga dan orang-orang terdekat serta tersayang yang senantiasa memberikan kasih, motivasi, dan doa sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur tak henti-hentinya penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“Pergalihan Pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023)”**.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi yang telah dibuat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih harus dikembangkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada di dalam penulisan ini serta secara terbuka menerima kritik dan saran yang membangun.

Proses penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan serta kerja sama dari pihak eksternal berupa pengajaran, bimbingan, arahan, dan dukungan baik secara langsung, maupun tidak langsung. Melalui kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi selama proses penyusunan skripsi. Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran serta motivasi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu;
6. Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran serta motivasi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Seluruh anggota keluarga penulis, Papah, Mamah, Ezra, dan Emily yang menjadi motivasi terbesar bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Rifqi Abhirama Prasetyo yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan penuh dan menerima kondisi penulis dalam keadaan apapun;
10. Sahabat-sahabat baik penulis sejak SD, SMP, dan SMA, yaitu Dinda, Aisha, Icha, Adiba, Aina, Keysha, Anin, dan Fiya;
11. Sahabat-sahabat baik penulis selama masa perkuliahan, yaitu Salwa, Meysiska, Clara, Dilla, Afrida, Rani, Shofi, dan Alma;
12. Sahabat-sahabat baik yang bekerja sama selama proses Kerja Praktik, yaitu Vinny, Asri, Dwi, dan Fani;

13. Rekan-rekan Badan Pengurus Harian dan Anggota Divisi Internal Ikatan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Tahun 2023
14. Seluruh Dosen Pembina dan teman-teman KKN Tematik Bergas Kidul 2023 yang telah bersama-sama membuat cerita pengabdian selama 45 hari;
15. Teman-teman ALSA *Local Chapter* Universitas Diponegoro terkhususnya *Membership and Organizational Development Division* yang telah kebersamai penulis dalam meningkatkan pengalaman di Fakultas Hukum;
16. Rekan-rekan Senator dan Staf Ahli Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Periode 2021/2022 yang telah kebersamai penulis dalam meningkatkan pengalaman di Fakultas Hukum; dan
17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan membantu proses penyusunan skripsi.

Demikian ucapan yang bisa disampaikan, besar harapan penulis untuk skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan dan ilmu pengetahuan teraktual bagi sesama.

Semarang, 29 Februari 2024

Penulis,

Aisha Safa Kamila

ABSTRAK

Keberadaan Pengadilan Pajak telah lama menjadi persoalan karena adanya dualisme pembinaan terhadap Pengadilan Pajak oleh dua lembaga berbeda, yakni Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung. Penelitian ini berdasar pada masalah-masalah yang dirumuskan antara lain, bagaimana kesesuaian pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung berdasarkan hukum positif nasional dan bagaimana urgensi pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder serta data primer sebagai data pendukung. Spesifikasi penelitian pada penulisan ini dilakukan secara deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan merupakan hasil dari *library research method* atau studi kepustakaan untuk data sekunder, serta teknik wawancara untuk mendapatkan data primer. Perolehan data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa gambaran secara komprehensif.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa kesesuaian hukum pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung dicapai melalui Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023 yang telah mendasarkan pada konsep kekuasaan kehakiman dalam rangka menjaga kemurnian peradilan yang imparsial dan independen. Penyatuatan kewenangan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Pajak juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Urgensi pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung adalah mengenai adanya keterlibatan Kementerian Keuangan selaku pemegang kekuasaan eksekutif melalui kewenangan pembinaan. Selain itu, kaitannya dengan objektivitas hakim dalam memutus perkara karena Pihak Tergugat atau Terbanding dan pihak penyelenggara peradilan berasal dari institusi yang sama, yakni Kementerian Keuangan.

Kata Kunci : Pengalihan Pembinaan; Pengadilan Pajak; Kementerian Keuangan

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENGUJIAN | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 11 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 12 |
| 3. Jenis Data..... | 12 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 14 |
| 5. Teknik Analisis Data..... | 15 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| G. Orisinalitas Penelitian | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 21 |
| A. Tinjauan terhadap Pajak | 21 |
| 1. Pengertian Pajak | 21 |
| 2. Fungsi Pajak | 23 |
| 3. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia..... | 24 |
| B. Tinjauan terhadap Sengketa Pajak | 25 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Jenis-Jenis Sengketa Pajak | 25 |
| 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak | 27 |
| C. Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman | 31 |
| 1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman | 31 |
| 2. Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya..... | 33 |
| D. Tinjauan terhadap Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman..... | 38 |
| E. Tinjauan terhadap Mahkamah Konstitusi | 41 |
| 1. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi | 41 |
| 2. Pengujian Yudisial atau <i>Judicial Review</i> | 44 |
| F. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 45 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Kesesuaian Pengalihan Pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung Berdasarkan Hukum Positif Nasional ... | 47 |
| 1. Perkembangan Lembaga Peradilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Perpajakan..... | 47 |
| 2. Penyatuan Sistem Pembinaan dan Pengawasan Secara Satu Atap oleh Mahkamah Agung terhadap Lembaga Peradilan di Bawahnya (<i>One Roof System</i>)..... | 57 |
| B. Urgensi Pengalihan Pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XXI/2023 | 65 |
| 1. Pengajuan Permohonan Uji Materiil pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengalihan Pembinaan Pengadilan Pajak | 65 |
| 2. Urgensi Pengalihan Pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung..... | 76 |
| BAB IV PENUTUP | 84 |
| A. Simpulan | 84 |
| B. Saran..... | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 88 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dualisme Pembinaan Pengadilan Pajak.....53



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Kewenangan Kementerian Keuangan.....54

